

PELAKSANAAN DIGITAL GOVERNMENT SERVICES BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ali Tarmuji

Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
Jln. Prof. Dr. Soepomo, S.H. Janturan Yogyakarta 55164 Telp (0274)-381523
e-mail : alitarmuji@gmail.com; alitarmuji@uad.ac.id

Abstrak

Pencanangan Jogja Cyber Province dengan konsep Digital Government Services (DGS) menunjukkan sikap yang jelas dari pemerintah Provinsi DIY untuk memanfaatkan TIK dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang menitikberatkan pada pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi melalui Pusat Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi DIY memperluas tugas dan fungsinya untuk merangkul seluruh elemen ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam satu kegiatan Supply Chain Management yang baik. Kegiatan ini menuntut kesiapan dan kemampuan peningkatan skill tenaga kerja, lembaga-lembaga kursus keterampilan tenaga kerja, meningkatkan aksesibilitas pelaku bisnis yang membutuhkan tenaga kerja yang sesuai dengan kompetensinya, lokasi transmigrasi yang membutuhkan penempatan, dan lain sebagainya. Selain itu Pusat Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi DIY juga menjadi pusat bertemunya antara tenaga kerja yang membutuhkan lowongan pekerjaan dan para pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja. Pusat Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi DIY juga menerapkan konsep One Roof by Systems yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di mana pelayanan kepada seluruh elemen rantai asupan ini dapat diberikan oleh berbagai institusi terkait, demikian pula akses dan distribusi tenaga kerja dapat dilakukan pada berbagai tempat. Penyusunan Detailed Technical Design (DTD) DGS Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian merupakan langkah awal menuju implementasi DGS di lingkungan tersebut.

Penyusunan DTD memerlukan suatu sumber daya terutama data yang cukup kompleks, sehingga untuk mendapatkannya diperlukan beberapa metode. Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai metode antara lain : wawancara dengan pimpinan Dinas Tenaga Kerja Provinsi D.I. Yogyakarta, studi pustaka di berbagai media dokumen yang dimiliki dinas dan pihak lain yang terkait, dan observasi ke lokasi khususnya Dinas Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian DIY. Data hasil dari pengumpulan tersebut akan disusun sebuah rancangan DTD DGS Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian..

Tahap pelaksanaan DGS di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian telah masuk pada tahap penyusunan DTD DGS Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian ini lebih dititiktekan pada penyusunan landasan yang jelas menuju proses implementasi program-program unggulan dalam rangka mewujudkan Jogja Cyber Province khususnya penyelenggaraan layanan berbasis digital. Laporan yang disusun tersebut berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas tentang layanan unggulan pada bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata Kunci : *detailed technical design, digital government services, jogja cyber province, tenaga kerja dan transmigrasi*

1. PENDAHULUAN

Paparan dalam makalah ini merupakan tinjauan umum tentang pelaksanaan program *e-governement* atau dalam istilah sekarang lebih dikenal dengan istilah *Digital Government Services* (DGS) di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Provinsi DIY. Dalam hal ini yang berkepentingan dan yang mempunyai tanggung jawab mengembangkan dan menyukseskan program ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi D.I. Yogyakarta. Kapasitas penulis dalam area ini hanyalah sebatas pembahas atau peninjau dari pelaksanaan program DGS di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian DIY dari hasil diskusi yang diselenggarakan oleh instansi terkait di antaranya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama dengan Badan Informasi Daerah (BID) DIY. Paparan berikut berdasarkan dokumen dan informasi yang didapatkan dalam diskusi dan informasi lain yang bersumber dari pelaksana program yang bersangkutan.

Pencanangan *Jogja Cyber Province* dengan konsep DGS menunjukkan sikap yang jelas dari pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang menitikberatkan pada pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal utama dalam DGS tersebut, antara lain :

1. Layanan Strategis, layanan unggulan yang menjadi pembeda (*differentiator*) dengan daerah lain di Indonesia dalam rangka meningkatkan daya saing. Layanan Strategis juga berfungsi sebagai pemercepat (*accelerator*) pencapaian tujuan.
2. Berorientasi masyarakat (*citizen centric*) – memberikan layanan bagi masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan daya saing dan taraf hidup.
3. Berbasis informasi dan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Rancangan Teknis Rinci atau *Detail Technical Design* (DTD) tentang layanan unggulan pada bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi D.I. Yogyakarta, peran pemerintah sebagai pengarah mata rantai asupan (*supply chain*) bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi sebagai penyelenggara layanan ini melalui Pusat Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi D.I. Yogyakarta memperluas tugas dan fungsinya untuk merangkul seluruh elemen ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam satu kegiatan *Supply Chain Management* yang baik. Kegiatan ini menuntut kesiapan dan kemampuan peningkatan skill tenaga kerja, lembaga-lembaga kursus keterampilan tenaga kerja, meningkatkan aksesibilitas pelaku bisnis yang membutuhkan tenaga kerja yang sesuai dengan kompetensinya, lokasi transmigrasi yang membutuhkan penempatan, dan lain sebagainya. Selain itu Pusat Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi D.I. Yogyakarta juga menjadi pusat bertemunya antara tenaga kerja yang membutuhkan lowongan pekerjaan dan para pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja. Pusat Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi D.I. Yogyakarta juga menerapkan konsep *One Roof by Systems* yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di mana pelayanan kepada seluruh elemen rantai asupan ini dapat diberikan oleh berbagai institusi terkait, demikian pula akses dan distribusi tenaga kerja dapat dilakukan pada berbagai tempat.

Penyusunan rancangan unggulan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian perlu menjabarkan lebih lanjut dari *Blueprint Jogja Cyber Province* sehingga didapatkan rancangan yang lebih operasional dalam bentuk rancangan teknis yang lebih rinci (*Detail Technical Design-DTD*) tentang beberapa aplikasi yang dapat dikembangkan untuk mengimplementasikan program-program layanan unggulan bidang tersebut. Keberhasilan dari pelaksanaan *Digital Government Services* terkait erat dengan kemampuan sumber daya manusia untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam kapasitas kerjanya masing-masing yang dinaungi oleh suatu tatanan organisasi yang baik.

Oleh karena itu, demi terwujudnya *good government* dan *good governance* dengan latar belakang tersebut di atas, khususnya penyelenggaraan pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sangatlah penting suatu *Digital Government Services* berbasis teknologi informasi dan komunikasi perlu diperhatikan keberadaannya. Melalui penyusunan *Detail Technical Design Digital Government Services* Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang layanan unggulan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi ini diharapkan hal tersebut segera terwujud.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pemahaman terhadap DTD DGS Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

- a. DTD DGS Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Provinsi DIY merupakan transformasi layanan strategis Pemerintah Provinsi DIY yang berorientasi pada masyarakat (*citizen centric*) yang berbasis pada proses bisnis, informasi, pengetahuan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai akselerator pembangunan wilayah provinsi yang berdaya saing, nyaman, mandiri, efisien, dan efektif.
- b. Program transformasi layanan ini merupakan kelanjutan dari program transformasi birokrasi yang telah dicanangkan sebelumnya.
- c. Program transformasi layanan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ini merupakan kelanjutan dari pengembangan layanan unggulan 6 bidang sebelumnya.
- d. Makna pokok dari DTD DGS Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian ini antara lain:
- e. *Detail Technical Design* (DTD) merupakan panduan pengembangan layanan strategis yang mencakup aspek sumberdaya manusia dan organisasi, proses dan teknologi.
- f. Transformasi layanan merupakan kunci sukses pengembangan layanan dengan melakukan transformasi bertahap terhadap kemampuan sumberdaya manusia dan organisasi, perbaikan proses kerja dan penerapan teknologi yang sesuai.
- g. Layanan strategis merupakan layanan unggulan yang menjadi pembeda dengan daerah lain di Indonesia dalam rangka meningkatkan daya saing. Layanan strategis juga berfungsi sebagai pemercepat pencapaian tujuan.
- h. Berorientasi masyarakat (*citizen centric*) merupakan pemberian layanan bagi masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan daya saing dan taraf hidup.
- i. Berbasis informasi dan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- j. Pengembangan layanan strategis direncanakan, dikembangkan, dan dikelola dengan proses dan metode inovatif guna menjamin kesinambungan dan kualitas layanan yang diberikan, hal ini berbeda dengan pengembangan layanan TI dan SIM pada umumnya.

Dari hasil diskusi didapatkan bahwa tujuan dari penyusunan DTD DGS ini meliputi ruang lingkup sebagai berikut.

- a. Mengidentifikasi kegiatan yang dapat memicu dan memacu peningkatan perekonomian dan taraf hidup masyarakat.
- b. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung tugas sehari-hari.
- c. Menyusun rencana pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung program *Jogja Cyber Province*.
- d. Meningkatkan komunikasi antarunit kerja khususnya dengan unit kerja teknologi informasi melalui pemahaman yang sama mengenai layanan yang akan dikembangkan.
- e. Pemilihan teknologi yang tepat dengan manfaat terbesar bagi pencapaian sasaran akhir.
- f. Memungkinkan terjadinya penggunaan layanan bersama untuk meningkatkan efisiensi dan mengendalikan biaya investasi.
- g. Menyiapkan strategi roadmap untuk mengembangkan arsitektur dan kemampuan dalam kurun tahun 2008-2010.
- h. Menyusun strategi pengembangan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat/komunitas IT di DIY yang secara tidak langsung ikut andil dalam mempercepat pengembangan budaya informasi ke arah terwujudnya masyarakat informasi (information society).

3. METODE PENGAMATAN

Paparan dalam makalah ini merupakan hasil dari beberapa penelaahan dari berbagai sumber terutama pada saat diskusi pemaparan program pelaksanaan DGS Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tersebut. Makalah ini dikompilasi dengan beberapa pemikiran dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan gagasannya dalam pelaksanaan program tersebut. Kompilasi dari berbagai sumber tersebut tidak seluruhnya dapat dipaparkan dalam makalah ini, sehingga dalam makalah ini hanya poin-poin yang dianggap penting untuk disampaikan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Tinjauan

Dari hasil kompilasi didapatkan beberapa pembahasan yang akan dipaparkan berikut ini.

Layanan yang dijalankan Disnakertrans tidak beda jauh dengan instansi yang lain. Model layanan jika dikaitkan dengan obyek yang dilayani terdapat beberapa alur, antara lain: *Government to Government* (G2G), *Government to Citizen* (G2C), dan *Government to Bisnis* (G2B). Menurut pengamatan sekian banyak layanan yang tergolong G2G sebanyak 33 jenis layanan (22,3%), G2C sebanyak 93 jenis layanan (62,84%), dan G2B sebanyak 21 jenis layanan (14,19%).

Dari jumlah dan prosentase didapatkan bahwa layanan terbanyak ditujukan untuk masyarakat (sebanyak 62,84%), ini membuktikan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibentuk dengan tujuan untuk melayani masyarakat terutama yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Beberapa potensi yang didapatkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berhubungan dengan sumber daya manusia antara lain:

- 1) Jumlah pegawai yang bekerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (tidak termasuk UPTD) sebanyak: 271 orang.
- 2) Tiap bidang telah ada pegawai yang dilatih untuk menggunakan TI, namun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk keperluan pekerjaan.
- 3) Pemanfaatan TI (terutama komputer) masih belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang kerja.

Beberapa potensi yang berhubungan dengan aspek infrastruktur antara lain:

- 1) Terdapat sedikitnya 60 unit komputer dan dari 60 unit komputer tersebut terdapat 13 komputer yang sudah terhubung ke jaringan WAN BID dan mampu terkoneksi ke intranet/internet.
- 2) Tiap bagian/ bidang telah memiliki komputer dan telah mencukupi untuk kegiatan administrasi.
- 3) Tiap bagian/ bidang telah memiliki koneksi ke internet.
- 4) Instalasi jaringan Local Areal Network (LAN) belum ada, pernah dipasang namun tidak digunakan dan rusak.
- 5) Telah terdapat komputer sebagai anjungan internet mandiri untuk akses layanan masyarakat, yang semestinya berada di teras (sebagai pelengkap front office) karena tidak ada yang menjaga maka posisinya sekarang berada di ruang Data dan TI.
- 6) Telah terdapat beberapa Sistem Informasi Manajemen (SIM), namun tidak semua difungsikan.
- 7) Sebagian SIM berbasis internet yang digunakan untuk pengisian form wajib lapor ke Depnaker dan Provinsi.

- 8) Pemanfaatan program bantu masih sedikit untuk menunjang kerja.

b. Potensi pengembangan

Potensi pengembangan ini yang nantinya memungkinkan untuk dijadikan program unggulan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Beberapa potensi tersebut antara lain.

- 1) Pembentukan tim pengelola infrastruktur IT
- 2) Pengembangan & pemanfaatan infrastruktur (LAN/WLAN; SIM)
- 3) Pengembangan pengetahuan IT SDM
- 4) Pembangunan *data center* untuk layanan *back/front office*
- 5) Pengembangan aplikasi SIM Back/front office
- 6) Pembangunan (pengembangan) web untuk layanan masyarakat dari semua bidang
- 7) Pembangunan aplikasi pemetaan (SIG) ketenagakerjaan & ketransmigrasian
- 8) Dibangun suatu forum: antarunit, dinas dengan masyarakat dan mitra
- 9) Dibangun: *call center, SMS center*

c. Change Management

- 1) Perubahan Prosedur Kerja menuju Berbasis IT

Prosedur kerja berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dalam mengembangkan dan mendukung pelaksanaan *Digital Government Services* Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengacu pada Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang *E-Government*. Berawal dari penyelenggaraan pemerintahan secara manual, dengan Inpres tersebut diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan secara *e-government*, dengan memanfaatkan *Information and Communication Technology* (ICT) atau Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

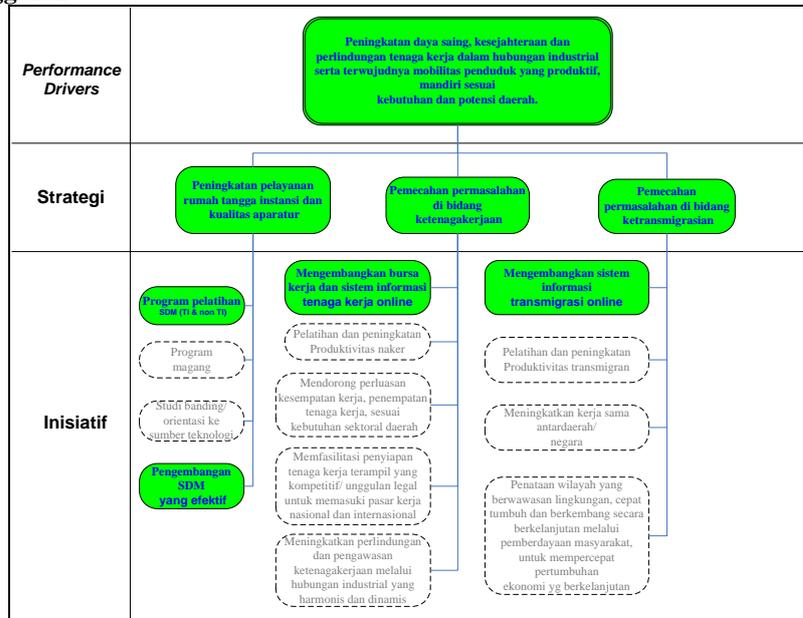
Tabel 1. Perubahan prosedur kerja menuju berbasis TI.

Transformasi	Pemanfaatan ICT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Budaya Kerja 2. Perubahan Proses Kerja 3. SOP dan Kebijakan 4. Peraturan dan Perundangan 5. Leadership 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan Internet/Intranet 2. Penggunaan Infrastruktur TIK 3. Penggunaan Sistem Informasi 4. Standarisasi Metadata 5. Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik 6. Sistem Dokumentasi Elektronik

- 2) Perubahan Tupoksi
 - a) Mencatat berkas pelayanan ke komputer (data digital)
 - b) Memantau dan menggunakan komputer dalam memproses pelayanan
 - c) Memantau dan merespon keluhan melalui komputer
 - d) Memetakan masalah ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berbasis komputer
- 3) Kepemimpinan
 - a) Mampu menggugah semangat terus mengikuti perkembangan TIK
 - b) Mampu untuk merencanakan, mengorganisir, memimpin, mengendalikan, dan mensponsori kegiatan berkaitan TIK
 - c) Mampu mengantisipasi dampak buruk terhadap perkembangan TIK
 - d) Mampu mengendalikan sikap dan perilaku terhadap pemanfaatan TIK
 - e) Mampu memberikan keteladanan pemanfaatan TIK
 - f) Mampu mengantisipasi munculnya kekecewaan pegawai terhadap diberlakukannya Sistem Informasi.
 - g) "Ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani" terhadap TIK.
- 4) Mekanisme Keanggotaan Tim TIK
 - a) Pengelolaan DGS bukan semata tanggung jawab seksi Data & TI saja, melainkan tanggung jawab bersama
 - b) Untuk menjaga keberlanjutan & ketersediaan layanan bidang TIK perlu dibentuk tim khusus pengelola TIK
 - c) Perlu policy & regulasi yang jelas
 - d) Anggota dapat terdiri dari orang yang mewakili:
 - (1) Dinas (per unit kerja) → sebagai pengambil kebijakan,
 - (2) Pemerintah tingkat di bawah dinas (kab/kota, kecamatan),
 - (3) Personil IT yang berkompeten,

- (4) Masyarakat, dan
 - (5) Mitra
- 5) Sumber Daya Manusia
Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dapat melalui beberapa rincian.
- a) Pendukung keberlangsungan penyediaan data dan informasi (dalam/luar dinas)
 - b) Pengelolaan LAN (per unit kerja min 1)
 - c) Penggunaan fasilitas internet/LAN (email, chat, milis, egrouppware)
 - d) Pemrograman internet (pengelolaan web Disnakertrans)
- 6) Infrastruktur
Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk pengembangan di sisi infrastruktur, antara lain:
- a) Perlu dibangun jaringan LAN dinas → mengkoneksikan seluruh unit kerja (seksi, UPTD, bidang/bagian, pimpinan)
 - b) Teknologi koneksi: kabel atau *access point*
 - c) Pembangunan data center
 - d) Pendukung penyediaan data & layanan (dalam/luar dinas)
 - e) Koneksi dengan instansi lain dan mitra
 - f) Dibuat mekanisme satu pintu keluar/masuk data

d. Layanan unggulan



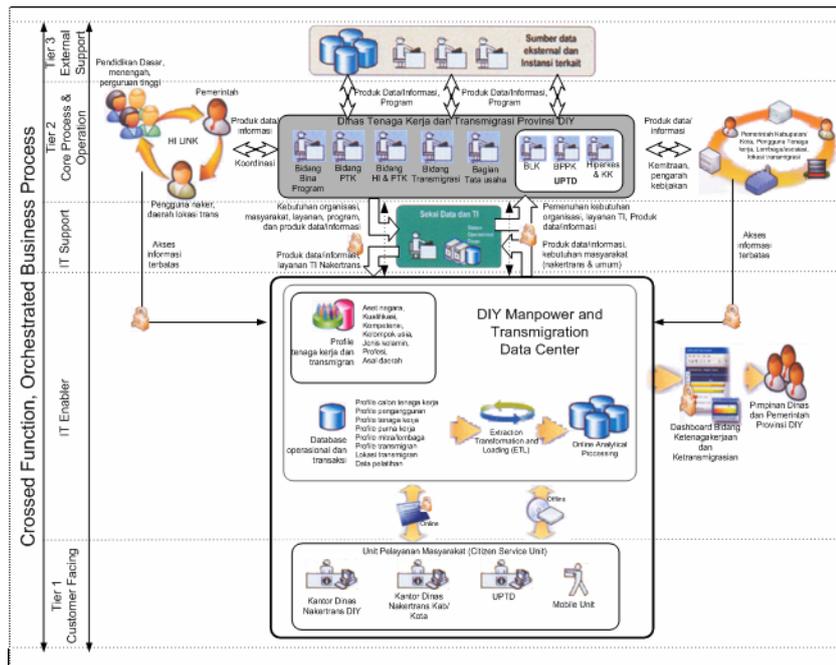
Gambar 1. Layanan unggulan dan nominasi layanan unggulan

e. Karakteristik Dasar Layanan

Layanan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian DIY ini memiliki karakteristik dasar sebagai berikut:

- 1) Pemerintah menjadi pengarah mata rantai asupan (supply chain) Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi D.I. Yogyakarta yang menyelenggarakan layanan ini melalui *DIY Manpower and Transmigration Center* memperluas tugas dan fungsinya untuk merangkul seluruh elemen yang terkait dalam satu kegiatan *supply chain management* yang baik.
- 2) *DIY Manpower and Transmigration Center* menjadi pusat bertemunya pencari lowongan (calon tenaga kerja) dan pengguna tenaga kerja dan juga sebagai pusat pendaftaran kepesertaan transmigrasi, serta berfungsi sebagai pusat kolaborasi data dari berbagai pihak yang terkait (tenaga kerja, pengguna tenaga kerja, mitra, unit kerja, lembaga, organisasi, dll).
- 3) *DIY Manpower and Transmigration Center* menerapkan konsep *one roof by systems* yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di mana pelayanan kepada seluruh elemen rantai asupan ini dapat diberikan oleh berbagai institusi terkait, demikian pula akses informasi lowongan, informasi transmigrasi, serta pendaftaran lowongan (pencari atau pengguna tenaga kerja) maupun transmigrasi dapat dilakukan pada berbagai tempat karena memanfaatkan fasilitas web sites.

4) Fasilitas layanan



Gambar 2. Fasilitas layanan

5. KESIMPULAN

Kesimpulan berikut berisi beberapa rekomendasi untuk mendukung pelaksanaan *Digital Government Services* (DGS) Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, antara lain:

- a) Menerapkan *Digital Government Services Framework* yang telah dipilih BID yang terdiri dari Landasan kerja dan Pilar Percepatan
- b) melaksanakan sosialisasi konsep DGS Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian ke berbagai pihak terkait, terutama aparaturnya Dinas, mitra, dan instansi terkait lainnya.
- c) Melaksanakan langkah taktis dan strategis untuk membangun landasan kerja, antara lain:
 - (1) Menjamin ketersediaan data primer yang digunakan oleh Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian khususnya untuk bidang unggulan. Ketersediaan dan penguasaan data primer adalah syarat mutlak keberhasilan implementasi DGS ini.
 - (2) Membangun kemitraan dengan berbagai pihak seperti pemerintah kabupaten/kota dan pelaku usaha untuk menjamin asupan data primer dan sekunder.
 - (3) Mengalokasi dana dan sumberdaya yang memadai serta menjamin ketersediaan dana dan sumberdaya berkesinambungan yang bersifat multi-tahun.
 - (4) Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian agar memiliki budaya pelayanan dan memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip bisnis yang berkembang luas di luar bidang pemerintahan.
 - (5) Melakukan transformasi pelayanan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dengan mengadopsi prinsip-prinsip dunia usaha seperti CRM, *Supply Chain Management*, *Business intelligent*, dan sebagainya.
 - (6) Menyeleraskan proses kerja (business process re-alignment) bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dengan misi pemerintah DIY, aspirasi, kebutuhan, dan kemampuan masyarakat serta tuntutan persaingan regional maupun global.
 - (7) Menyesuaikan tupoksi bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dengan proses kerja baru yang telah diperbaiki.
 - (8) Memberikan insentif berbasis unjuk kerja (performance based incentive).
 - (9) Membuat kebijakan dan peraturan untuk mendukung landasan kerja.
- d) Melaksanakan langkah taktis dan strategis untuk mengembangkan pilar percepatan, antara lain:
 - (1) Menentukan prioritas implementasi layanan unggulan tahun 2008 hingga 2010 dan melaksanakannya.
 - (2) Melakukan sosialisasi layanan unggulan secara kesinambungan guna meningkatkan jumlah pengguna layanan.
 - (3) Menentukan model pengelolaan layanan unggulan dan menentukan organisasi pengelola layanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY.
 - (4) Membangun, memperbaiki, dan memantapkan kehandalan dan ketersediaan sarana komunikasi data dan perangkat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY sehingga terjaga koneksinya dengan BID.

- (5) Terus-menerus mengembangkan dan memperkuat layanan operasional dan pendukung berbasis TI.
- e) Melaksanakan pembangunan/ pengembangan dan memanfaatkan layanan berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIM) semaksimal mungkin.
 - f) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dalam rincian kegiatan yang tertuang di TOR DGS Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dengan penyesuaian seperlunya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Nomor 8, 2003, *tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah*, Pemerintah RI, Jakarta.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 2, 2004, *tentang Pembentukan Dan Organisasi Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Pemda DIY, Yogyakarta.
- Instruksi Presiden Nomor 3, 2003, *tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*, Pemerintah RI, Jakarta.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 6, 2003, *tentang Renstrada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2004-2008*, Pemda DIY, Yogyakarta.
- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2005, *Blueprint Jogja Cyber Province 2005*, Pemda DIY, Yogyakarta.
- Laporan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Visi misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.